

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN  
KEMASYARAKATAN**  
**Studi Kasus Gabungan Kelompok Tani Sinar Hala, Desa Lewohala, Kecamatan Ile  
Mandiri, Kabupaten Flores Timur**

***LEVEL OF COMMUNITY PARTICIPATION IN COMMUNITY FOREST  
MANAGEMENT***  
***Case Study Of The Sinar Hala Farmers Group Association, Lewohala Village,  
Ile Mandiri District, East Flores Regency***

**Desi Ferderika Nalle<sup>1\*</sup>, Ludji Michael Riwu Kaho<sup>2</sup>, Astin Elise Mau<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> *Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Kupang  
Jalan. Adisucipto Penfui, kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.*

<sup>\*</sup>*Email Korespondensi: nalledesi4@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan pengelolaan HKm, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta evaluasi/monitoring. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, yang merupakan salah satu wilayah dengan program HKm melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sinar Hala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Gabungan Kelompok Tani Hutan Sinar Hala pada tahap perencanaan Hutan Kemasyarakatan tergolong rendah (46,75%), dan pada tahap monitoring dan evaluasi tergolong rendah (25%) dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan hutan dan belum terbentuknya kelembagaan kelompok yang kuat. Sedangkan pada tahap pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan tergolong tinggi (62,76%), dan pada tahap pemanfaatan tergolong tinggi (63,59%) dikarenakan masyarakat mengelola areal HKm dengan menanam tanaman perkebunan, pangan, dan hortikultura yang hasilnya digunakan untuk konsumsi maupun dijual. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh manfaat ekonomi langsung dan pentingnya penguatan kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan program HKm. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi KPH dan pemerintah daerah dalam peningkatan efektivitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

**Kata Kunci:** Hutan Kemasyarakatan, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Hutan

**ABSTRACT**

*Level of community participation in the stages of Community Forest (HKm) management, including planning, implementation, utilization, and evaluation/monitoring. This research was carried out in Lewohala Village, Ile Mandiri District, East Flores Regency, which is an area with an HKm program implemented through the Sinar Hala Farmers Group Association (Gapoktan). The results of study indicate that the participation of the Sinar Hala Community Forest Farmers Group Association was relatively low in the planning stage of Community Forestry (46.75%), and also low in the monitoring and evaluation stage (25%). This is attributed to the community's lack of awareness regarding the importance of forest management and the absence of strong group institutionalization. Conversely, community participation was found to be high in the implementation stage of Community Forestry (62.76%) and in the utilization stage (63.59%). This high participation is due to the community managing the HKm area by planting plantation, food, and horticultural crops, the yields of which are used for both consumption and sale. These findings suggest that community participation is significantly influenced by direct economic benefits and the importance of strengthening institutional capacity to support the sustainability of the HKm program. This research is expected to serve as evaluation material for the Forest Management Unit (KPH) and local government in enhancing the effectiveness of community-based forest management.*

**Keywords:** Community Forest, Community Participation, Forest Management Description

Received: 27 April 2026; Revised: 01 Mei 2026; Accepted: 23 Mei 2026; Published: 25 Mei 2026

Vol. 3 No. 2. Mei 2026 | **MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi**

127

## PENDAHULUAN

Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat. Salah satu skema yang diterapkan dalam kerangka kebijakan tersebut adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang secara yuridis diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Regulasi ini mendefinisikan HKm sebagai kawasan hutan negara yang pemanfaatannya diprioritaskan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat setempat. Sejalan dengan hal tersebut, Kaskoyo et al. (2017) menegaskan bahwa program HKm dirancang sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan program HKm adalah Desa Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur. Pelaksanaan program di wilayah ini dikelola oleh gabungan kelompok tani hutan yang mendapat pendampingan dari tenaga penyuluh kehutanan pemerintah, serta berpeluang menjalin kerja sama dengan lembaga independen, seperti forum HKm provinsi dan organisasi lain yang memiliki visi serupa. Dalam konteks ini, Mulyadi (2016) menyatakan bahwa keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, terutama yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan sebagai aktor utama pengelolaan.

Areal kelola Hkm diberikan sejak tahun 2018, dengan luas kelola  $\pm$  141 Ha untuk jangka waktu 35 tahun dan telah mendapat izin pemanfaatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 7544/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 pada 19 Oktober 2018. Tanaman yang ditanam pada lahan HKm adalah tanaman kemiri, kakao, lada, jambu mete, bambu dan dalam perencanaan untuk penanaman porang. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) ini diberi nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sinar Hala yang terdiri dari 5 KTH yakni KTH Lado Majo, KTH Wato Dat, KTH Wairang, KTH Siri Gokok dan KTH Nama Tukan. Sistem pengelolaan yang dilakukan masyarakat pun masih sangat sederhana, sehingga diperlukan sistem pengelolaan hutan yang dapat memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan fungsi hutan.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari, keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan menjadi suatu keharusan, mengingat mereka merupakan pihak yang paling intensif berinteraksi langsung dengan ekosistem hutan tersebut (Sanjaya, 2016). Konsep yang menjadi landasan dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat. Gagasan mengenai partisipasi telah mendapat perhatian yang semakin luas dalam diskursus

pembangunan selama dua dekade terakhir, di mana konsep tersebut merujuk pada keterlibatan aktif dalam ranah sosial, kemasyarakatan, maupun dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan (Winata et al., 2015). Konsep partisipasi digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji sejauh mana anggota kelompok tani hutan terlibat dalam pengelolaan HKm, mengukur intensitas keterlibatan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang turut memengaruhinya. Derajat partisipasi masyarakat dapat tercermin melalui keterlibatan mereka pada setiap tahapan proses pengelolaan hutan kemasyarakatan, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta pemantauan dan evaluasi. Adapun wujud partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pengelolaan HKm dapat bervariasi, mencakup kontribusi dalam bentuk gagasan atau pemikiran, dukungan finansial, maupun curahan tenaga secara langsung (Sagita, 2019).

Berdasarkan dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Lewohala. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, serta rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan terkait pengelolaan HKm di wilayah tersebut. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan hutan yang lestari dapat terjaga, sekaligus mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2023, bertempat di Desa Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peralatan yang digunakan selama penelitian berlangsung meliputi alat tulis, telepon pintar, dan laptop, sementara bahan yang digunakan terdiri atas panduan observasi lapangan dan kuesioner terstruktur.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui proses wawancara dan pengisian kuesioner, yang mencakup karakteristik responden, data partisipasi, serta gambaran umum kondisi HKm yang dikelola. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui penelusuran dokumen, arsip, dan laporan yang relevan, meliputi kondisi umum lokasi penelitian, peta wilayah, data kependudukan, dan informasi pendukung lainnya.

Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Pengukuran jawaban responden dilakukan menggunakan Skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu: (4) Selalu (SL), (3) Sering (SR), (2) Kadang-kadang (KK), dan (1) Tidak Pernah (TP) terlibat dalam kegiatan pengelolaan HKm. Untuk memperoleh nilai interpretasi, terlebih

dahulu ditentukan skor tertinggi (Y) melalui perhitungan menggunakan rumus Indeks sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2010):

$$Y = \text{Skor Tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

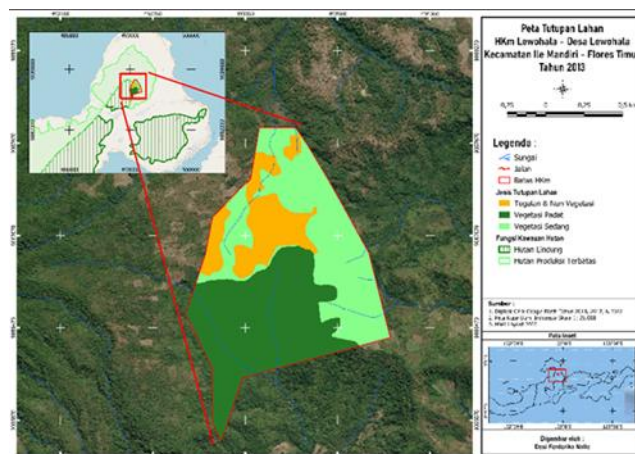
Penilaian Interpretasi adalah nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index % :

$$\text{Rumus Index \%} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

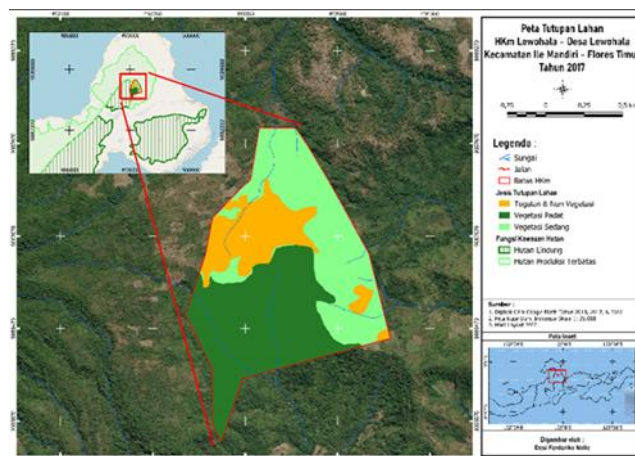
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tutupan Lahan IUPHKm Desa Lewohala

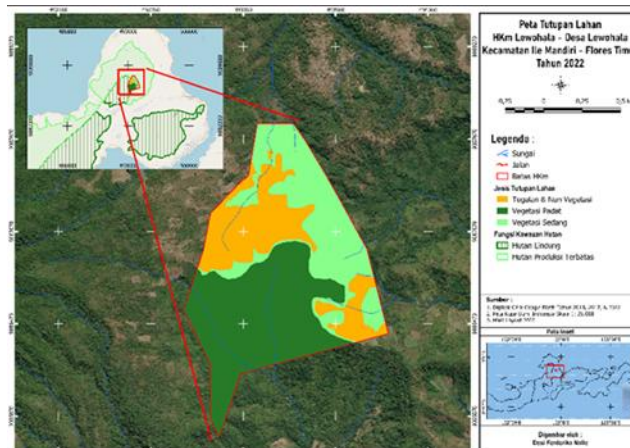
Luas IUPHKm Desa Lewohala adalah + 141 Ha yang terbagi pada Kawasan Hutan Lindung seluas ±44 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas ±97 Ha. Berikut akan disajikan peta tutupan lahan IUPHKm Desa Lewohala dari tahun 2013, 2017 dan tahun 2022 melalui Digitasi Citra *Google Earth*.



**Gambar 1.** Tutupan Lahan Tahun 2013



**Gambar 2.** Tutupan Lahan Tahun 2017



**Gambar 3.** Tutupan Lahan Tahun 2022

### **Pengelolaan Hutan Komunitas Desa Lewohala**

Pada umumnya masyarakat Gapoktan Hutan Sinar Hala masih menerapkan metode sederhana dengan mengadopsi sistem tumpang sari, yakni pola pertanaman campuran (polyculture) yang melibatkan dua jenis tanaman atau lebih dalam satu hamparan lahan secara bersamaan atau dalam rentang waktu yang berdekatan. Masyarakat mengelola HKm dengan menanam tanaman perkebunan, tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Sebelum mendapatkan IUPHKm, beberapa masyarakat terlebih dahulu merambah kawasan hutan dengan menanam tanaman perkebunan yaitu Kemiri, Jambu Mete dan Kakao.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, umumnya masyarakat yang baru mengelola lahan HKm, membuka lahan dengan memangkas dan menebang pohon dengan tujuan persiapan lahan untuk pembukaan lahan. Setelah membuka lahan, beberapa Masyarakat memilih menanam tanaman pangan dan tanaman hortikultura sehingga pada areal tersebut jarang ditemukan tegakan pohon. Hal ini tentu saja dapat mengurangi fungsi ekologi kawasan hutan yang mana diperuntukan sebagai penyangga sumber daya air, pengendali banjir, pencegah terjadinya erosi, serta penjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan HKm**

Dalam penyusunan rencana kegiatan HKm diketahui masyarakat tidak pernah terlibat. Kelembagaan Gapoktan Hutan Sinar Hala yang buruk menyebabkan belum ada pertemuan untuk seluruh masyarakat guna membahas rencana kegiatan HKm. Maryudi (2016) mengemukakan bahwa kelembagaan perlu dijabarkan ke dalam aturan main yang telah disepakati bersama, bersifat mengikat, dan memiliki mekanisme sanksi yang jelas, dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan serta kepastian dalam pola interaksi sosial yang berlangsung di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, belum adanya pertemuan-pertemuan kelompok dan Gapoktan sehingga masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan ide dan tukar pikiran

terkait pengelolaan HKm. Dalam penentuan jenis tanaman dan areal penanaman masyarakat sendiri menentukan jenis tanaman yang akan ditanam dan areal penanaman di lahan HKm masing-masing. Kelembagaan Gapoktan Hutan Sinar Hala belum memiliki rencana kerja dan aturan sehingga belum ada wacana untuk peningkatan kegiatan pengolahan dan keamanan dalam areal HKm.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan HKm**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sebagian besar masyarakat Gapoktan Hutan Sinar Hala sudah mengelola lahan HKm mereka dengan diawali dengan proses pembersihan areal tanam sebelum melakukan penanaman tanaman. Dalam kegiatan pembersihan lahan, masyarakat menggunakan peralatan yang masih sederhana seperti parang, cangkul, sisir rumput dan tofa. Tidak semua bibit untuk penanaman berasal dari masyarakat, namun merupakan bantuan dari pemerintah dan dinas-dinas terkait serta kegiatan penanaman dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat melakukan pemeliharaan tanaman dengan tujuan agar tanaman dapat tumbuh dengan subur sehingga menghasilkan panen yang baik. Masyarakat yang memiliki kebun pribadi diluar areal HKm mengaku kurang melakukan pemeliharaan tanaman dikarenakan masih memiliki kebun pribadi diluar areal HKm sehingga hasil panen tanaman kurang maksimal. Masyarakat tidak terlibat dalam pelatihan dan pendampingan dikarenakan tidak dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait serta faktor kelembagaan Gapoktan Sinar Hala yang tidak berjalan.

Purwanto dan Huraerah (2006) mengartikan pembinaan dan pemeliharaan kelompok sebagai serangkaian upaya yang dilakukan secara kolektif guna menjaga keberlangsungan dan mendorong perkembangan dinamika kelompok. Lebih lanjut, Slamet (1978) merinci bahwa upaya tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain mendorong tumbuhnya partisipasi anggota, menyediakan fasilitas yang memadai, menggerakkan aktivitas kelompok, membangun koordinasi yang efektif, menjalin komunikasi yang baik, menetapkan norma bersama, melaksanakan sosialisasi, serta memperluas keanggotaan kelompok.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan HKm**

Sebagian besar masyarakat yang sudah mengelola lahan HKm melakukan kegiatan pemanenan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selebihnya dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga. Tanaman yang paling sering dipanen untuk dikonsumsi adalah sayur Singkong, Ubi Jalar dan Ubi talas. Masyarakat memasarkan hasil HKm mereka tergantung dari banyaknya hasil panen, beberapa masyarakat memanen hasil HKm hanya untuk dikonsumsi sehari-hari. Menurut Sanjaya (2017) mengungkapkan bahwa masyarakat pada umumnya menerapkan saluran pemasaran hasil hutan kayu yang paling singkat, yaitu melalui rantai produsen–pengumpul–konsumen. Pola ini dipilih karena proses penjualan langsung ke pasar memerlukan biaya transportasi yang tidak sedikit, selain adanya kekhawatiran terhadap risiko hasil panen yang

tidak terserap pasar. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat lebih memilih menjual hasil panennya kepada pengumpul sebagai langkah efisiensi dalam menekan biaya produksi.

Belum optimalnya fungsi kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berdampak pada minimnya pelatihan yang diberikan oleh instansi terkait. Kondisi ini sejalan dengan temuan Markum et al. (2015), yang menyatakan bahwa salah satu persoalan yang kerap dihadapi oleh pemegang izin HKm adalah rendahnya dukungan pembinaan dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait dalam hal teknis pengelolaan HKm yang baik dan benar. Situasi ini mencerminkan adanya kecenderungan pembiaran, di mana masyarakat dibiarkan mengelola lahannya tanpa panduan teknis yang memadai. Berbagai kebutuhan mendasar terkait tata kelola kawasan yang efektif, peran kelembagaan yang optimal, serta kemandirian usaha, selama ini belum mendapat respons yang dianggap memadai oleh para petani. Waznah (2006) menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya pemerintah yang meliputi kurangnya tenaga lapangan, minimnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang menyulitkan pemerintah dalam mengelola kawasan hutan secara mandiri. Di samping itu, pendekatan pengelolaan kawasan yang kurang partisipatif, kurang transparan, serta rendahnya akuntabilitas turut memperlemah efektivitas tata kelola hutan kemasyarakatan secara keseluruhan.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring dan Evaluasi HKm**

Sebagian besar masyarakat cenderung mengelola HKm secara individual. Kelembagaan Gapoktan Hutan Sinar Hala yang buruk mengakibatkan sampai saat ini Gapoktan belum menyusun rencana kerja untuk mengatur seluruh kegiatan pengelolaan HKm demi terwujudnya tujuan bersama sehingga belum ada monitoring perkembangan seluruh kegiatan pengelolaan HKm yang sedang dilakukan. Gapoktan Sinar Hala belum pernah melakukan evaluasi bersama guna mengetahui peningkatan kemajuan, perkembangan, dan hambatan pengelolaan HKm. Gapoktan Sinar Hala hingga saat ini belum memiliki rencana kerja yang komprehensif sebagai acuan dalam mengatur dan mengoordinasikan aktivitas kelompok tani hutan. Padahal, keberadaan rencana tersebut sangat diperlukan sebagai landasan dalam membangun pola kerja kolektif yang sinergis guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip kelembagaan yang berlaku. Kelembagaan Gapoktan dan kelompok yang buruk, mengakibatkan tidak ada pertemuan-pertemuan serta diskusi bersama, sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan ide tentang solusi terkait kendala-kendala yang dijumpai dalam pengelolaan HKm.

## Deskripsi Partisipasi Masyarakat Gapoktan Sinar Hala Terhadap HKm

Berdasarkan kajian data hasil angket diperoleh Tabel 1 Partisipasi masyarakat Gapoktan Hutan Sinar Hala terhadap HKm Desa Lewohala sebagai berikut.

**Tabel 1.** Partisipasi masyarakat Gapoktan Hutan Sinar Hala terhadap HKm Desa Lewohala

Variabel	Indikator	Total Skor	Index (%)	Kategori
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi dalam perencanaan HKm	43	46,75	Rendah
	Partisipasi dalam pelaksanaan HKm	57,75	62,76	Tinggi
	Partisipasi pemanfaatan HKm	58,5	63,59	Tinggi
	Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi HKm	23	25	Rendah

Sumber: Pengelolaan Data Primer

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa partisipasi dalam perencanaan tergolong rendah (46,75%), partisipasi dalam pelaksanaan tergolong tinggi (62,76%), partisipasi dalam pemanfaatan tergolong tinggi (63,59%), partisipasi dalam monitoring dan evaluasi tergolong rendah (25%). Keterlibatan masyarakat secara aktif merupakan elemen yang tidak dapat ditawar dalam implementasi pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan Hutan Kemasyarakatan. Partisipasi yang diharapkan mencakup seluruh rangkaian tahapan pengelolaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, hingga tahap evaluasi dan pemantauan. Namun demikian, pada tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Perencanaan pengelolaan hutan sejatinya merupakan tahapan awal partisipasi masyarakat yang harus dilakukan sebelum kegiatan pemanfaatan hutan dimulai. Pemanfaatan hutan baru dapat berjalan secara efektif apabila masyarakat setempat telah dilibatkan secara bermakna sejak proses perencanaan berlangsung.

Muis (2020) mengungkapkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan hutan masih sangat terbatas, baik dalam hal penentuan program prioritas, penetapan jenis kegiatan yang akan dijalankan, penyusunan anggaran, maupun identifikasi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila proses perencanaannya telah dirancang dengan baik dan melibatkan masyarakat secara penuh, sehingga mendorong rasa memiliki yang tinggi dan mendorong masyarakat untuk turut menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman kerusakan.

Keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan cenderung lebih dominan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, dibandingkan pada tahap perencanaan maupun evaluasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan yang memberikan dampak atau manfaat secara langsung bagi kehidupan mereka. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Rochmayanto et al. (2006), yang menegaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah pada tahap perencanaan dan pemantauan HKm, namun cukup tinggi pada tahap pelaksanaan. Selain itu, sejumlah potensi masyarakat juga belum didayagunakan secara

maksimal, yang tercermin dari belum optimalnya peran organisasi penggerak serta belum terbangunnya persepsi masyarakat yang kuat dan positif mengenai program HKm.

Kelembagaan Gapoktan Hutan Sinar Hala yang buruk mengakibatkan sampai saat ini Gapoktan belum menyusun rencana kerja untuk mengatur seluruh kegiatan pengelolaan HKm demi terwujudnya tujuan bersama. Menurut Aminah (2018) Kelembagaan yang berfungsi secara aktif dan optimal memiliki kecenderungan untuk memberikan kontribusi positif terhadap dinamika dan perkembangan kelompok, sehingga mendorong terciptanya pengelolaan yang lebih terorganisir dan produktif.

Partisipasi masyarakat Gapoktan Sinar Hala akan lebih baik jika ketersediaan modal masyarakat, sarana prasarana penunjang serta adanya pemberdayaan dari pemerintah. Pemerintah terkait belum sepenuhnya mendukung masyarakat dengan menyediakan pendampingan serta jaringan pemasaran hasil HKm. Sanjaya (2017) menekankan bahwa kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Kehutanan ke lokasi lahan kelola masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian kegiatan HKm yang telah berjalan. Di samping monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, keterlibatan lembaga di luar instansi pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), juga dinilai perlu untuk turut serta dalam proses pemantauan guna memperkuat pengawasan secara menyeluruh dan independen.

## KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat Gabungan Kelompok Tani Hutan Sinar Hala pada tahap perencanaan Hutan Kemasyarakatan tergolong rendah (46,75%), dan pada tahap monitoring dan evaluasi tergolong rendah (25%) dikarenakan rendahnya kesadaran dalam pengelolaan HKm dan belum terbentuknya kelembagaan yang baik. Sedangkan pada tahap pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan tergolong tinggi (62,76%), dan pada tahap pemanfaatan tergolong tinggi (63,59%) dikarenakan masyarakat mengelola areal Hutan Kemasyarakatan mereka masing-masing dengan menanam tanaman perkebunan, pangan dan holtikultura yang hasilnya selain untuk dikonsumsi dapat juga dijual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, Purwanto. 2006. *Dinamika Kelompok: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Aminah, L. N. 2018. *Analisis kelembagaan gapoktan di Kesatuan Pengelolaan Hutan IX Kota Agung Utara Kanupaten Tanggamus Provinsi Lampung*. Thesis. Lampung: Universitas Lampung. 86 hlm.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A. J. & Inoue, M. 2017. *Impact of community forest*

- program in protection forest on livelihood outcomes: A case study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*, 36(3), 250-263.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum. 1/10/2016. Tentang Perhutanan Sosial. Jakarta.
- Markum, Budhy Setiawan, Rahmat Sabani. 2015. Hutan Kemasyarakatan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Mataram : RA Visindo.
- Maryudi, A. 2016. Arahana tata hubungan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 10(1), 57-64.
- Muis, H. 2020. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). (Kasus: di kelurahan Layana dan kelurahan Lambara Kecamatan Palu Timur). IPB: Bogor.
- Mulyadi. 2016. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Program Gerakan Nasional.
- Sagita, M. N., Akhbar, A., & Muis, H. 2019. Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Labuan Tapos Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*, 7 (2).
- Sanjaya, R. 2016. Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.
- Sanjaya, Rizki., Christine Wulandari., Susni Herawanti. 2017. Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 5 No.2, April 2017 (30-42) .
- Slamet. 1978. Kumpulan bahan bacaan penyuluh pertanian. IPB. Bogor
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Waznah. 2006. Pengelolaan dan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. *Jurnal Lingkungan Hidup*. Vol. 6 (1) 2.
- Winata, N. G. A. W., Basuki, P., & Karismawan, P. 2015. Analisis Determinan Pendapatan Petani Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 1 (1).
- Rochmayanto, Yanto. 2006. Analisis Partisipasi pada program Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Koto Panjang, Riau). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, vol. 3, no. 3, pp. 175-189.